



KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
Nomor : B-1116/OT.210/H.10.3/07/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 undang undang Nomor 14 tahun 2008, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya menetapkan daftar Informasi Publik sebagai pedoman bagi petugas PPID untuk memberikan informasi publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan Penetapan Informasi Publik untuk jenis informasi di Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tentang Perubahan atas

- | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-------|
| | Peraturan | Menteri | Pertanian | Nomor |
| | 32/Permentan/OT.140/5/2011 | | | |
| | Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; | | | |
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 380/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025
- PERTAMA : Daftar Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib disediakan oleh penanggung jawab dan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan informasi publik oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian informasi publik;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 07 Juli 2025

KEPALA BALAI,

LUTFI IZHAR
NIP 1974111281999031002

Salinan Keputusan Kepala Balai ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 :
 Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 Nomor : B-1116/OT.21/H.10.3/07/2025
 Tanggal : 07 Juli 2025

**Daftar Informasi Publik PPID
 Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 Tahun 2025**

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
1.	Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
2.	Struktur Organisasi, Gambaran umum, Visi-Misi, Profil singkat pejabat struktural, Tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
3.	Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan LHKASN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
4.	Aset Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
5.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
6.	Peraturan Pemerintah	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
7.	Statistik Kepegawaian	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
8.	Laporan Keuangan	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
9.	SK PPID	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
10.	Daftar Pegawai	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
11.	Profil SDM Fungsional	Balai Perakitan dan	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
		Pengujian Lingkungan Pertanian						
12.	Surat Keputusan Kepala Balai	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
13.	Pedoman Mutu Balai	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
14.	Formulir Balai	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
15.	SOP	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
16.	Sertifikat Akreditasi SNI ISO 9001:2015	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	3 Tahunan	Berkala
17.	Informasi Kegiatan Yang telah diperiksa Itjen	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Bagian Tata Usaha	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
18.	Laporan Tahunan	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
		Pertanian						
19.	LAKIN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
20.	Matrik program 2020-2024	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
21.	Renstra 2020-2024	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
22.	Rencana Kerja Tahunan 2023-2026	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
23.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
24.	Pagu Anggaran	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
25.	Realisasi Anggaran	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
26.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
27.	Daftar Kerja Sama	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
28.	Laporan Bulanan	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
29.	Rencana atau target Kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun (RKT)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Program dan Evaluasi	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
30.	Daftar Informasi Publik	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
31.	Daftar HAKI	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
32.	IKM	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
33.	Laporan PPID	Balai Perakitan dan	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
		Pengujian Lingkungan Pertanian						
34.	Panduan Mutu Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
35.	Instruksi Kerja Metode Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
36.	Formulir Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat
37.	Sertifikat Hasil Uji Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	2 Tahunan	Setiap saat
38.	Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	5 Tahunan	Berkala
39.	Maklumat Pelayanan	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
40.	Hasil Inovasi Teknologi (Produk)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Setiap saat

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk		Retensi	Klasifikasi Dokumen
					Soft copy	Hard copy		
		Pertanian						
41.	Komitmen Bersama Pelaksanaan KIP	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
42.	Tarif Layanan PNBK (PP Nomor 28 Tahun 2023)	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala
43.	Daftar Parameter dan Harga Uji Laboratorium	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Tim Kerja Layanan	2025, Pati	√	√	1 Tahunan	Berkala

Kepala Balai,

 LUTFI IZHAAR
 NIP. 197411281999031002

Lampiran 2

Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Nomor : B-1116/OT.21/H.10.3/07/2025

Tanggal : 07 Juli 2025

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Rekaman Mutu Balai	- Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - SNI ISO 9001:2015 klausul 7.5 (pengendalian informasi terdokumentasi)	-	Potensi disalahgunakan	Menjaga integritas sistem mutu
2.	Rekaman Laboratorium	- SNI ISO/IEC 17025:2017 Klausul 4.2 Kerahasiaan - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium	-	Data laboratoium dapat disalahgunakan	- Keamanan data laboratorium terjamin - Meningkatkan kepercayaan pelanggan laboratorium
3.	Prosedur Mutu Balai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d, f, h	-	- Kehilangan kerahasiaan teknis - Risiko disalahgunakan	- Melindungi kerahasiaan - Memperkuat perlindungan hukum dan audit

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
4.	Dokumen Prosedur Laboratorium	- Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2, 4.1.5 Kerahasiaan	-	- Membuka rahasia metode - Rawan disalahgunakan pihak luar - Menurunkan daya saing.	- Menjaga daya saing - Melindungi reputasi laboratorium.
5.	Daftar Induk Dokumen Laboratorium	- Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 - SNI ISO/IEC 17025: 2017 klausul 4.2 Kerahasiaan	-	- Membuka rahasia metode - Rawan disalahgunakan pihak luar	- Menjaga kelancaran sistem mutu - Mendukung integritas akreditasi - Mencegah manipulasi.
6.	Instruksi Kerja Alat	- Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2 Kerahasiaan	-	- Membuka rahasia metode - Rawan disalahgunakan pihak luar - Menurunkan daya saing.	- Menjamin keselamatan alat, - Mendukung integritas akreditasi - Mencegah penyalahgunaan.
7.	Instruksi Kerja Khusus	- Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 4.2 Kerahasiaan	-	- Membuka rahasia metode - Rawan disalahgunakan pihak luar - Menurunkan daya saing.	- Menjamin keselamatan alat, - Mendukung integritas akreditasi - Mencegah penyalahgunaan.
8.	Hasil pemeriksaan kasus dan laporan	Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008	Sampai dengan laporan	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Merugikan proses	Menjamin independensi pemeriksaan, menjaga obyektivitas hasil audit,

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
	tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara	diserahkan ke BPK	penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature - Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara - Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga - Dapat mengungkapkan surat – surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK RI dan	mendukung integritas lembaga.

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
				BPKP.	
9.	Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 6, asas kerahasiaan) • PerLKPP No. 12 Tahun 2021 (Etika Pengadaan)	Sampai dengan proses selesai	• Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat • Risiko kolusi • Intervensi eksternal	• Menjamin persaingan sehat • Menjaga keadilan • Mencegah tekanan pihak luar.
10.	Data Pegawai Daftar riwayat hidup pegawai Biodata pegawai elektronik dan non elektronik Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4) pegawai Hasil general checkup kesehatan pegawai Hasil evaluasi	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi • UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	-	Penyalahgunaan identitas, risiko peretasan, potensi ancaman fisik & psikis, pelanggaran hak privasi.	• Melindungi privasi pegawai • Mendukung keamanan data, • Menjaga keselamatan individu.

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
	kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai Rekomendasi tim etika Izin perkawinan/ perceraian Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	• PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN (Pasal 63)			



LUTFI IZHAR

NIP. 197411281999031002